

Para pengunjung yang budiman,



Selamat datang di situs Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan hukum. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI, BPHN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional;
- b. pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum, perencanaan hukum, penyuluhan dan bantuan hukum, serta dokumentasi dan jaringan informasi hukum;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Globalisasi merupakan kondisi inheren dalam kehidupan bangsa Indonesia ke depan, maka tatanan hukum harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tercipta kepastian hukum, agar kita tidak karam di tengah jalan atau menjadi bangsa yang teragap-gagap.

Sebagai negara hukum, hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan Indonesia. Pembangunan hukum nasional secara eksplisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia masih terjadi perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosio-kultural yang mendukung perubahan tersebut.

Pembangunan hukum yang menempatkan peranan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat sampai saat ini belum mengalami perubahan. Hal ini merupakan salah satu tugas dari BPHN untuk terus mengupayakan hukum menjadi panglima.

Peran serta publik dan *stakeholder* sangat penting untuk mendukung langkah-langkah yang dilakukan BPHN dalam rangka pembangunan hukum ke depan.

Besar harapan kami agar situs BPHN dapat membantu masyarakat dan *stakeholder* untuk memperoleh informasi yang handal dan terpercaya dalam kaitan dengan pembangunan hukum.